

ISSN : 0126-396X

Dialog

Vol. 72, No. 2, Tahun. XXXIV, Nopember 2011

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

Pasang Surut Politik Islam

Jurnal Dialog	Nomor 072	Tahun XXXIV	Halaman 150	Jakarta Nop 2011	ISSN 0126-396X
------------------	--------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------

Terakreditasi C No: 362/AU1/P2MBI/07/2011

Terakreditasi C No:
362/AU1/P2MBI/07/2011
ISSN : 0126-396X

Pemimpin Umum:

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:

DR.H.M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

Wakil Pemimpin Redaksi:

H. Wahyudi, S.Pd.

Sekretaris Redaksi:

Hj. Astuti Nilawati, S.Pd.

Mitra Bestari:

1. Prof. Dr. H.M. Athon Mudzhar, M.A.
2. Prof. Dr. H. Komarudin Hidayat, M.A.
3. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar
4. Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah

Dewan Redaksi:

1. Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud, M.A.
2. Dr.H. Imam Tholikhah
3. Drs. H. Muhammad Shohib, M.A.
4. Drs. Choirul Fuad Yusuf, SS, M.A.
5. H. Chamdi Pamudji, SH, MM.
6. Drs. H. Praptono Zamzam, M.Sc.

Redaktur Eksekutif:

M. Nasir, S.Th.I

Redaktur Pelaksana:

1. Abas Jauhari, MSI.
2. Umu Rahmah

Administrasi:

1. Mulyadi Azwan
2. Dra. Hj. Aini Moerad
3. Willa Widdharari, S.Kom.

Alamat Redaksi:

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama
Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380
Website: www.Balitbangdiklat.kemenag.go.id

PENGANTAR REDAKSI

PASANG SURUT POLITIK ISLAM

Relasi antara Islam dan politik di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang, dan mengalami pasang surut. Politik identitas yang coba ditampilkan oleh umat Islam melalui perwakilan tokoh-tokohnya mengalami kekalahan, di antaranya ketika tujuh kata dalam piagam Jakarta dihapus. Meskipun begitu keberhasilan politik Islam pada pemilu pertama menunjukkan prestasi yang cukup baik dengan tercatat sebagai partai pemenang kedua (Masyumi) dan ketiga (NU) setelah PNI. Namun keberhasilan yang ditunjukkan umat Islam pada pemilu tahun 1955 rontok pada masa Presiden Soekarno dengan penerapan Demokrasi Terpimpinnya. Apalagi setelah tokoh-tokoh penting

Jurnal Dialog diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, intelektual dan akademisi untuk mengkomunikasikan gagasan secara ilmiah dan kreatif bagi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia

partai Masyumi dipenjarakan oleh sang presiden, keperkasaan politik umat Islam sedikit memudar.

Gerakan reformasi pasca berakhirnya orde baru telah mengubah wajah perpolitikan Indonesia, demikian pula perpolitikan umat Islam. Kondisi negara yang cenderung tidak setabil menuntut berbagai pihak merasa perlu untuk mendesakkan demokrasi, kebebasan, transparansi, akuntabilitas publik, atas persoalan-persoalan bangsa, berkaitan dengan seluruh tatanan masyarakat. Tak ayal pertentangan dan konflik sosial terus terjadi. Berbagai kepentingan, baik yang mendasari atas nama bangsa dan kelompok tertentu, juga ikut mewarnai.

Terbukanya kran kebebasan dalam berpendapat, berkumpul, dan berserikat menjadi salah satu pendorong menguatnya gerakan masyarakat sipil. Di satu sisi, gerakan ini menjadi harapan karena mampu mendorong dan menjadi stabilisator pemerintahan, namun di saat yang lain semakin mengancam. Kegetiran masyarakat atas berbagai persoalan terutama dalam hal ekonomi, politik, dan degradasi moral menjadikan masyarakat mencari alternatif baru.

Salah satunya adalah munculnya berbagai pemikiran politik Islam yang kemudian melahirkan banyak gerakan. Konsolidasi di tingkatan negara terus dilakukan, namun pada saat yang sama, terdapat konsolidasi internal di kalangan umat Islam. Eksistensi Islam politik pada masa kemerdekaan dan sampai pada pasca revolusi pernah dianggap sebagai pesaing yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Persepsi tersebut membawa implikasi terhadap keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan

domestikasi terhadap gerak ideologis politik Islam. Sebagai hasil dari kebijakan semacam ini, bukan saja para pemimpin dan aktifis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan atau agama negara. Tetapi mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik "minoris" atau "outsider". Lebih dari itu, bahkan politik Islam sering dicurigai sebagai anti ideologi Negara Pancasila. Gejala menurunnya ketegangan hubungan antara Islam dan Negara mulai terlihat pada pertengahan tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya peluang umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya serta munculnya kebijakan-kebijakan tersebut berspektrum luas.

Munculnya partai-partai Islam di Indonesia telah menimbulkan perdebatan tersendiri. Dalam pandangan sementara kalangan, fenomena itu dinilai sebagai perwujudan dari hadirnya kembali politik Islam, atau ada yang mengistilahkan sebagai "repolitikasi Islam". Ketika berhadapan dengan kekuasaan dan negara, politik Islam di Indonesia sering berada pada posisi dilematis. Dilema yang dihadapi menyangkut tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara determinan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam seringkali dihadapkan pada beberapa pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi dalam dirinya.

Jurnal Dialog vol. 72 XXXIV, 2011 ini mencoba menyoroti Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia. Kajian Jurnal Dialog edisi ini diawali dengan tulisan M. Firdaus

Khalimi tentang *Memahami Politik Masyarakat Muslim*. Dilanjutkan dengan tulisan Muhammad Himawan Sutanto, yang menulis tentang *Kegagalan Partai Politik Islam : Kegagalan Agenda Setting?* Sedangkan Miftahussurur menghadirkan tulisannya tentang *Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia*. Ifa Avianty dan Thobib Al-Asyhar menghadirkan tulisan tentang *Perubahan Paradigma Peran Politik Pemuda Islam Indonesia dari Masa Ke Masa*. Edisi ini kian menarik dengan hadirnya tulisan Herdi Sahrasad tentang *Reformasi Mesir: Berkaca pada Indonesia?* dan Ihsan Ali-Fauzi yang menghadirkan tulisan tentang *"Paradigma Karbala dan Protes Politik Kaum Syi'ah*. Kajian semakin lengkap dengan hadirnya tulisan Abdul Waid tentang *Populisme Akar Ketahanan Politik Identitas: Refleksi Pasang Surut Politik Islam dari Era Orde Lama hingga Era Orde Reformasi*.

Pada edisi ini juga dihadirkan kajian Ismatu Ropi tentang Rohis: *Dari Pencarian Identitas ke Ideologisasi Agama*, dan tulisan Nursh Shalihin Djamra tentang *Rasionalisasi Agama dalam Arena Politik: dari Pilihan Ideologis ke Pertimbangan Rasional*. Kajian ini diakhiri dengan telaah buku yang berjudul *Negara Islam* karangan Musdah Mulia. Buku ini secara umum mengurai dan mengulas pemikiran Haikal tentang negara Islam. Semoga kajian yang dihadirkan Jurnal Dialog edisi ini memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam kajian politik Islam, khususnya di Indonesia. Selamat Membaca!

Redaksi

DAFTAR ISI

TOPIK

FIRDAUS KHALIMI

Memahami Politik Masyarakat Muslim — 1

MUHAMMAD HIMAWAN SUTANTO

Kegagalan Partai Politik Islam : Kegagalan Agenda Setting ? — 12

MIFTAHUSSURUR

Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia — 26

IFA AVIANTY DAN THOBIB AL-ASYHAR

Perubahan Paradigma Peran Politik Pemuda Islam Indonesia dari Masa Ke Masa — 44

HERDI SAHRASAD

Reformasi Mesir : Berkaca pada Indonesia? — 63

IHSAN ALI FAUZI

Paradigma Karbala dan Protes Politik Kaum Syi`ah — 83

ABDUL WAID

Populisme Akar Ketahanan Politik Identitas : Refleksi Pasang Surut Politik Islam dari Era Orde Lama Hingga Era Orde Reformasi — 97

PENELITIAN

ISMATU ROPI

Rohis: Dari Pencarian Identitas ke Ideologisasi Agama — 114

NURUS SHALIHIN DJAMRA

Rasionalisasi Agama dalam Arena Politik: Dari Pilihan Ideologis ke Pertimbangan Rasional — 126

BOOK REVIEW

MEILANI DEWI

Mengurai Pemikiran Haikal tentang Negara Islam — 140

PASANG SURUT DAN FRAGMENTASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

MIFTAHUSSURUR*

ABSTRAK:

This descriptive-analytics article is aimed to trace-back the dynamics and fragmentation of political Islam in Indonesia. It focuses on relation between the dynamics of political Islam and its historical process and its social-political context. After reformation era, the power of political Islam in Indonesia has been getting highly and more fragmented. Rather, the fragmentation was seemingly caused by interest of elites than ideology dispute. It was the reason why the power of political Islam has been never unified, even to boost the people's interest. The political Islam tended to struggle enforcing God's law (syariah) rather than solving the real problem such as economy and basic need of society or ummah. In the fact, enforcing the Syariah law was merely artificial one. Finally, the political Islam always fails in transforming social, economy and politics due to its elitism.

Artikel yang bersifat deskriptif-analitis ini bertujuan melacak kembali dinamika atau pasang-surut dan fragmentasi politik Islam di Indonesia, dengan menghubungkan dinamika tersebut dengan proses-proses historis dan konteks sosial-politik yang membentuknya. Setelah masa reformasi, kekuatan politik Islam semakin terfragmentasi secara tajam. Fragmentasi ini tampaknya lebih disebabkan oleh kepentingan elit masing-masing kelompok tersebut ketimbang atas dasar perbedaan ideologi. Hal ini menyebabkan kekuatan politik Islam tidak pernah benar-benar bulat apalagi jika hendak memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat. Adapun perjuangan atas identitas Islam dalam wujud penegakan syariat adalah upaya yang bersifat artifisial saja ketimbang menyentuh isu ekonomi dan kebutuhan mendasar umat. Walhasil, keberhasilan politik Islam dalam melakukan transformasi sosial, ekonomi dan politik selalu digagalkan sendiri oleh watak elitis dari arus politik Islam utama.

Kata-kata kunci:

Fragmentasi, politik Islam, syariat Islam, ideologi

* Peneliti independen, penulis buku, magister bidang sosiologi Universitas Indonesia.

Pendahuluan

Sejak era kemerdekaan, sebagian umat Islam Indonesia selalu berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan ekspresi politiknya ke dalam politik formal. Selama masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan dan sepanjang masa rezim Orde Baru yang otoriter upaya-upaya ini terus dilakukan meskipun ekspresi politik Islam selalu dibatasi, baik oleh penguasa maupun oleh karena persaingan antar beragam kekuatan politik dalam arena kompetisi politik. Seperti terlihat di sepanjang rezim diktator, beragam kelompok, gerakan dan pemimpin Islam terkooptasi ke dalam struktur negara yang sebenarnya berwatak sekular. Melalui berbagai taktik, penguasa waktu ini secara selektif mengakomodasi tuntutan kelompok Islam yang terus tumbuh. Namun Suharto menggunakan Islam ketika popularitasnya turun dan berupaya mengakomodasi mereka pada saat mana kesadaran Islam mulai bangkit pada tahun 1980an. Rejim Soeharto membentuk aliansi dengan partai Islam untuk dikendalikan, yang pada gilirannya membuat kekuatan politik Islam sendiri terfragmentasi.

Pada era demokratisasi, ekspresi politik Islam jauh lebih terbuka yang kendetipun begitu warna politik Islam tampak sangat terdiferensiasi. Ini misalnya tercermin dari banyaknya organisasi politik dan kemasyarakatan yang bervisi Islam baik sebagai prinsip organisasi maupun dalam kerangka kenegaraan. Beberapa partai mendukung formalisasi Islam ke dalam negara, sementara kebanyakan lainnya mencoba mengawinkan nilai keagamaan dengan demokrasi. Selain

tumbuhnya partai-partai Islam, elemen-elemen politik Islam yang bercorak radikal dan berada di pinggiran politik formal juga tampil ke permukaan, kendetipun pelan-pelan mulai kehilangan dukungan. Terutama sejak bom Bali tahun 2002 yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI), kredibilitas kelompok radikal di kalangan Islam sendiri sangat buruk dan ancaman kekerasan teroris ini terus berkurang sebagai dampak dari kampanye kontra-terorisme.

Dalam artikel ini, penulis akan berusaha mengeksplorasi dinamika politik Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini tidak bertumpu pada sudut pandang ideologi dan visi doktriner Islam yang membentuk politik Islam kontemporer --meskipun aspek yang belakangan ini tentu tak bisa diabaikan begitu saja karena faktor ideologi rupanya menjadi salah satu aspek penting dalam konstelasi politik umat Islam, dimana integrasi dan fragmentasi antar kelompok-kelompok Islam terbentuk. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini terutama bersifat sosiologis dan historis yang berupaya menghubungkan dinamika politik Islam dengan perubahan sosial-ekonomi masyarakat Islam serta konflik dan pertarungan kekuasaan serta perebutan sumberdaya ekonomi-politik yang berlangsung.

Adapun politik Islam di sini secara longgar dimaknai sebagai politik yang secara normatif merujuk pada nilai-nilai Islam sebagai "karakter moral tertinggi" dalam bernegara guna menciptakan sebuah masyarakat yang baik.¹ Namun, per-definisi politik

¹ Dhurorudin Mashad. *Akar Konflik Politik Islam*

Islam sebetulnya harus dibedakan dari Islam itu sendiri. Jika Islam merupakan doktrin, politik Islam lebih merupakan ekspresi subyektif karena merupakan hasil interpretasi atau pemikiran seseorang sehingga sangat dipengaruhi oleh kualifikasi sang pemikir dan juga konteks sosial, politik dan ekonomi dari aktivitas politik yang dijalankan itu sendiri. Ekspresi politik semacam ini bisa berwujud formal misalnya dalam bentuk partai politik atau organisasi sosial-keagamaan, tetapi juga non-formal seperti termanifestasikan di dalam gerakan dakwah dan organisasi perlawanan atau pemberontakan-pemberontakan. Oleh karena itu, artikel ini cenderung mau memperlihatkan keragaman politik Islam ini dalam bingkai dinamika sosial-historis serta perubahan politik dan ekonomi, tanpa ingin terjebak dalam fantasi akademis yang selama ini lebih populer. Misalnya, para sarjana Barat memonitor Islam dengan membagi-bagi kelompok Islam dalam dikotomi "Islam moderat" dan "Islam radikal", atau "muslim yang baik" dan "muslim yang buruk" dalam kaitannya dengan masalah keamanan global.²

Masalah mendasar yang dikaji dalam artikel ini adalah basis sosial macam apa yang mempengaruhi dinamika politik Islam di Indonesia, dan apakah politik Islam yang memakai amunisi ideologis Islam untuk meng-

artikulasikan ketidakpuasan sosial dan politik sukses melakukan transformasi sosial dan politik pada level pemerintahan; serta apa pula penyebab sukses atau kegagalan politik Islam kontemporer di Indonesia.

Basis Sosial Politik Islam di Indonesia

Di Indonesia, ekspresi politik Islam pertama kalinya muncul pada awal abad ke-20. Sarekat Islam (SI) merupakan organisasi politik yang paling menonjol dan kemunculannya berkaitan dengan konflik-konflik ekonomi dengan penguasa Cina di Hindia Belanda. Organisasi yang disebut oleh Koeber³ sebagai partai politik pertama di Indonesia ini merupakan benih nasionalisme pertama yang mulai tumbuh di ibu pertiwi. Organisasi ini didirikan oleh para pedagang kecil perkotaan yang kebanyakan berpandangan modernis dan penganut Islam "murni". Kendati begitu SI juga memperoleh dukungan dari kalangan pedesaan Jawa yang sinkretik, terutama didukung oleh para bangsawan Jawa yang sudah kehilangan status sosial dan kekuasaannya. Namun mulai tahun 1920an SI mengalami fragmentasi dimana anggota-anggotanya membentuk Persyarikatan Komunis (awal 1920an) yang kemudian bermetamorfosis menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Penyadar (1936), Partai Islam Indonesia (PII, 1938), dan sebagian lagi membentuk Komite Pertahanan Kebenaran.⁴

di Indonesia. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008. hal. 29

² Hamilton-Hart, N. 'Terrorism in Southeast Asia: expert analysis, myopia and fantasy', *Pacific Review* 18(3), 2005: 303-325. Pendekatan sosiologis-historis di sini seperti yang dilakukan oleh Hadiz dalam: Vedi R. Hadiz & Khoo Boo Teik. "Approaching Islam and politics from political economy: a comparative study of Indonesia and Malaysia". *The Pacific Review*, 2011, Vol. 24 No. 4: 463-485

³ A.P.E Koeber. *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?*. Jakarta: Grafiti Press, 1985. hal. 267-271

⁴ Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1982

Tidak bisa dimungkiri bahwa penggunaan identitas keagamaan SI sebetulnya tak bisa dipisahkan dari kepentingan ekonomi kalangan Islam waktu itu yang kalah bersaing dengan pengusaha Cina. Ini disebabkan oleh sistem pembagian kerja kolonial Belanda yang memberikan hak monopoli di sektor perdagangan kepada etnis Cina sehingga mereka menguasai sektor bisnis, khususnya perdagangan batik.

Di pertengahan abad ke-20, politik Islam diekspresikan lewat partai politik dan diperjuangkan di arena parlemen, selain juga dalam wujud pemberontakan-pemberontakan. Pada masa-masa perang kemerdekaan misalnya, terlihat bahwa negara RI yang baru "seumur jagung" itu ditempa oleh proses kontestasi yang sangat tajam yang melibatkan beragam representasi politik Islam. Pada satu sisi ekstrim, pemberontakan Darul Islam (DI) merupakan ekspresi politik Islam yang penting waktu itu. Berdalih ingin membentuk negara Islam, pemberontakan ini pada awalnya disebabkan oleh ketidakpuasan para pejuang kemerdekaan yang dipimpin Kartosoewirjo terhadap penyerahan Jawa Barat kepada Belanda selama perundingan perang. Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. TNI harus mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Namun tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah S.M. Kartosuwiryo beserta para pendukungnya, yang menentang perundingan tersebut. Akhirnya pemberontakan itu memang

bisa dikalahkan oleh TNI pada tahun 1962. Selanjutnya dengan melabeli pemberontakan itu sebagai pengkhianatan terhadap bangsa sebagaimana yang terjadi di Aceh dan Sulawesi Selatan, maka para pengikut politik mereka di kemudian hari tidak bisa masuk secara leluasa ke dalam gelanggang politik formal.

Sebagaimana diketahui dominan politik Islam di Indonesia tahun 1950an direpresentasikan oleh partai Masyumi yang modernis dan Nahdlatul Ulama (NU) yang tradisional.⁵ Label "modernis" yang diberikan para akademisi dan pengamat ini biasanya merujuk pada kecenderungan kelompok ini dan kelompok serupa yang menghendaki purifikasi Islam. Mereka mengklaim membawa semangat ijtihad namun berupaya kembali kepada kemurnian Islam dengan menolak berdialog dengan tradisi lokal dan nasional yang dipersepsi menyimpang. Adapun tipe tradisional biasanya dialamatkan kepada kelompok muslim yang dianggap menolak ijtihad dan berkukuh memegang pemikiran dan madzhab yang dikembangkan Imam Syafi'i, kendatipun sebenarnya kelompok ini mampu berdialog dengan tradisi lokal dan perkembangan baru yang ada secara selektif yang mustahil tanpa suatu ijtihad.

Terlepas dari kategorisasi yang salah kaprah yang diberikan oleh para pengamat (kebanyakan dari kaum modernis terdidik di Barat

⁵ Sejumlah kekuatan politik Islam lainnya juga sudah eksis, namun mereka beranggotakan relatif kecil di bandingkan dua kekuatan di atas. Misalnya, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang bercorak tradisional. Selain itu Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Muhammadiyah, Thawalib, Persatuan Islam (Persis), dan Jamiatul Khair yang kemudian Al-Irsyad yang bertipe modernis.

dan dalam suasana perang dingin), dalam konteks spektrum politik Indonesia kecenderungan umum dari politik Islam di pertengahan abad lalu adalah *pembelaan yang sungguh-sungguh terhadap kepentingan ekonomi pribumi* di satu sisi dan pada saat yang sama menjadikan Islam sebagai ideologi negara.⁶ Beberapa anggota Masyumi pernah memberontak karena ketidakpuasan ekonomi terhadap pemerintah, sehingga tahun 1960 Soekarno melarang Masyumi. Kendati demikian pengikut Masyumi terus berkembang di kalangan pengusaha dan secara konsisten menolak para penguasa sekuler. Sejumlah mantan anggota Masyumi mendirikan sebuah organisasi bernama Darul Islam (DI); namun sebagian lainnya pada 1980an dan 1990an, berkembang dan memperoleh pengikut dari kalangan menengah dan kaum miskin kota berkat akses besar yang mereka peroleh (bersama kaum modernis lainnya) dari dunia pendidikan modern.

Sementara itu Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan representasi tipe tradisional adalah organisasi keagamaan yang mendapat dukungan dari jaringan kiai pesantren dan para elit dan petani pedesaan khususnya desa-desa di Jawa. Oleh karena itu sering disebutkan bahwa NU adalah gejala desa berbasis pesantren dan petani. Sebenarnya pesantren tak memiliki hubungan organisatoris dengan NU tetapi NU hampir diidentikkan dengan dunia pesantren. Alasannya, pertama pembentukan NU dipelopori oleh para kiai yang memiliki pesantren; dan kedua sebagian besar kiai adalah anggota NU sehingga santri dan masyarakat petani

di lingkungan pesantren yang berada di desa itu menjadi basis dukungan NU.⁷ Pada jaman pergerakan kemerdekaan, sikap NU bersifat non-kooperatif terhadap penjajah, dan ketika berhadapan dengan pemerintah NU bersikap lentur selama persoalannya di tingkat kalkulasi politik tak berhimpit dan mengancam integritas agama. Misalnya selama Demokrasi Terpimpin, NU cepat berhitung: lebih baik melawan PKI di arena pertempuran (terlibat dalam pemerintah Soekarno) ketimbang menyerahkan medan percaturan politik secara bulat kepada musuh.⁸

Sebagaimana sudah disinggung di muka bahwa Islam merupakan pilar utama nasionalisme Indonesia yang baru lahir. Namun demikian sebagaimana terlihat dari sejarah SI dan sejarah beberapa varian kelompok Islam yang berkembang di kemudian hari seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Parmusi dan lain-lain, entitas politik Islam sangat jelas terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang bahkan saling bersaing di antara mereka sendiri, selain juga bersaing dengan banyak bentuk gerakan populisme dan nasionalis sekular. Pada kasus penyusunan konstitusi negara amat terlihat jelas bahwa kelompok-kelompok Islam gagal menjadikan Islam sebagai ideologi negara dan pada saat yang sama populisme nasionalis Soekarno lebih menonjol. Persaingan politik dan ideologis juga menguat ketika kalangan Islam berhadapan dengan PKI yang berhasil membangun kekuatan populisme radikal yang

⁷ Dhurorudin Mashad. *Op.cit.* hal. 7

⁸ Abdurrahman Wahid, "Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa Ini", *Prisma*, No. 4 April 1984, hal. 31-33, sebagaimana dikutip dari Dhurorudin Mashad. *Op.cit.* hal. 8

⁶ Vedi R. Hadiz & Khoo Boo Teik. *Op.cit.*

mengancam kepentingan material politik Islam, khususnya terhadap konstituen utamanya yakni kaum borjuis kecil kota dan para elit pedesaan⁹. Kendatipun secara ideologis kelompok Islam ini amat beragam, pertarungan yang sebagian besar dilandasi motif ekonomi ini akhirnya menyatukan pilihan kelompok-kelompok Islam untuk merapatkan barisan ke pihak militer dan mendukung kampanye berdarah melawan komunis pada tahun 1960an.

Tampaknya, setelah komunisme yang mengancam basis ekonomi kalangan (elit) Islam ini berhasil dihancurkan oleh aliansi Islam dan militer, ada harapan besar di kalangan Islam untuk memegang kekuasaan dan menjalankan agendanya. Namun seperti yang akan kita lihat dinamika politik Islam berlangsung tak seperti yang diharapkan. Politik Islam tetaplah terfragmentasi, bahkan terkooptasi oleh kepentingan dan kekuasaan otoriter Soeharto yang selama 32 tahun memimpin pemerintahan rezim Orde Baru.

Peminggiran Islam Politik

Era Orde Baru bisa dikatakan sebagai masa dimana aktivitas Islam politik formal mengalami peminggiran. Begitu pula gerakan-gerakan radikalisme Islam di luar politik formal direpresi. Kendati begitu rezim ini tidak seluruhnya menolak keterlibatan kelompok-kelompok Islam dalam pemerintahan. Sebab pada kenyataannya, proses marginalisasi Soeharto terhadap Islam politik justru menciptakan trend baru, suatu trans-

formasia ke arah menguatnya aktivitas *civil society* Islam yang dikemudian hari menjadi salah satu kekuatan utama yang ikut meruntuhkan rezim otoriter Orde Baru.

Di awal-awal Orde Baru gerakan politik Islam dalam wajahnya yang formal sebenarnya berusaha muncul kembali ke permukaan setelah tenggelam di era Demokrasi Terpimpin. Berbagai kelompok Islam optimis bahwa jasa-jasa mereka bersama militer (ABRI) dalam menumbangkan Orde lama dan menumpas kekuatan PKI akan menghembuskan angin segar kepada kekuatan politik Islam untuk tampil memimpin dalam pemerintahan baru. Pada saat itu isu Piagam Jakarta menyeruak kembali, dan begitu pula sejumlah kelompok aktivis Islam berusaha menghidupkan kembali Masyumi atau partai Islam baru.

Kendati begitu, sebelum kelompok-kelompok Islam mekar kembali, rupanya militer segera meminggirkan sekutu muslimnya itu dengan suatu alasan bahwa kekuatan Islam dengan akar rumput yang kuat akan merusak logika berdirinya Orde Baru untuk menjalankan pembangunan kapitalis yang berbasis pada demobilisasi politik masyarakat.¹⁰ Selain itu menurut paradigma Orde Baru bangkitnya militansi Islam dianggap sebagai fenomena ancaman bagi bangkitnya kembali konflik ideologis yang mendominasi masa Orde Lama. Lalu apa yang dilakukan pemerintah Orde Baru adalah melakukan kontrol ketat terhadap kekuatan politik Islam, terutama yang radikal seperti Masyumi. Karena itu bukan politik Islam yang ditegakkan, melainkan Pancasila versi negara-lah yang

⁹ PKI mempersepsi borjuis Islam sebagai ancaman dengan menyebut mereka sebagai salah satu dari "tujuh setan desa".

¹⁰ Vedi R. Hadiz & Khoo Boo Teik. *Op.cit.*

diagungkan dan pada saat yang sama ruang ekspresi bagi aktivis Islam dibatasi terutama lewat perluasan sekolah-sekolah tradisional Islam.¹¹

Apa yang lalu dilakukan oleh rezim Orde Baru adalah pembonsaian kekuatan politik Islam Parmusi, NU, PSII dan Perti ke dalam wadah satu partai yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dilakukan pada 5 Januari 1973. Bersamaan dengan PDI dan Golkar, penyederhaan partai ini dikontrol ketat negara. Fusi keempat partai Islam dalam PPP tersebut sama sekali bukan awal persatuan seluruh parpol Islam. Melainkan fusi yang direkayasa Orde Baru dan merupakan awal dari marginalisasi. Selain itu, peleburan ini juga secara internal melahirkan fragmentasi internal. Rivalitas tak terhindarkan terjadi antara unsur-unsur dalam PPP terutama antara Parmusi (yang kemudian berubah nama menjadi Muslimin Indonesia (MI)) dan NU. Kedua partai ini berkonflik karena pembagian kekuasaan dalam partai yang tidak memuaskan kedua belah pihak. Pada puncaknya adalah ketidakpuasan NU terhadap kepemimpinan H.J. Naro yang menyingkirkan banyak tokoh NU dari jajaran pengurus partai. Puncaknya pada muktamar ke 27 di Situbondo, NU sebagai unsur utama PPP menyatakan kembali ke khittah 1926 dan menyatakan ketakterikatan secara organisatoris dengan partai manapun.

Ditinggalkan NU, praktis PPP yang dianggap merepresentasi suara politik Islam mengalami penggemosan politik. Disusul kemudian dengan bergabungnya sejumlah kiai ke dalam

Golkar secara politik merupakan simbol bahwa PPP sebenarnya sudah tidak mewakili suara Islam. Tibalah saatnya rezim Orde Baru menyempurnakan peminggiran. Melalui UU No. 5/1985 pemerintah secara legalistik mengharuskan adanya penyeragaman asas tunggal. Dengan demikian PPP secara formal sudah terdegradasi dari statusnya sebagai partai Islam.

Memahami kondisi yang demikian itu, akhirnya banyak tokoh-tokoh pemimpin Islam moderat berangsur-angsur menarik diri dari penggunaan Islam sebagai kendaraan politik dan mengubah haluan gerakan ke aktivitas yang cenderung non-politik (gerakan sosio-kultural). Kekuatan mayoritas politik Islam melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan cara menggeser orientasi. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh organisasi sosial dan keagamaan yang kembali memfokuskan perhatian pada isu pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pada 1970an aktor-aktor kunci aktivis Islam seperti Dawam Raharjo, Djohan Effendi dan Nurcholis Madjid mempromosikan pluralisme intelektual Islam. Pandangan moderat, reformis dan demokratik mereka diformulasikan dalam asosiasi dekat mereka dengan dan lewat organisasi mahasiswa HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Cak Nur, demikian cendekiawan muslim Nurcholis Madjid ini biasanya dipanggil, dan bersama aktivis-aktivis lainnya diinspirasi oleh suatu upaya atau ijtihad untuk membangun dan mentransformasikan Islam lewat *civil society* Islam yang dinamis ke dalam komunitas yang maju dengan teknologi dan sains yang sedang berkembang. Fokus mereka adalah pendidikan, kesejahteraan sosial dan penguatan organisasi-organisasi sosial ketimbang

¹¹ J.T. Sidel, *Riots, Pogroms and Jihad: Religious Violence in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 2006.

langsung menyasar kekuasaan negara.¹² Sementara itu NU sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia sejak 1984 menyatakan diri kembali ke khittah 1926 yang berarti kembali ke fungsi awal pendiriannya untuk mengurus kehidupan keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Kekuatan aktivitas mereka ini kemudian membentuk basis bagi kebangkitan *civil society* Islam yang terbesar di Indonesia yang mendahului dan mempersiapkan suatu gelombang kejatuhan Soeharto.

Bagaimanapun juga penting untuk dicatat bahwa para aktivis Islam dan kelompok muslim baru yang menarik diri dari politik formal ini merupakan kelas menengah baru, berbasis di perkotaan dan menikmati keuntungan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di bawah kekuasaan Suharto. Selama beberapa dekade, Pemerintah Soeharto yang sekular dan otoritarian namun juga berwatak *developmental*. Di bawah Soeharto sejak 1960an hingga 1990an Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi 6% sehingga berhasil membangun fondasi ekonomi kapitalisme modern. Keuntungan pertumbuhan itu dibagi-bagikan kepada masyarakat hingga ke level desa-desa, dipergunakan membangun pasar-pasar, sekolah-sekolah dan puskesmas, dan jalan-jalan. Selain itu kesempatan kerja juga relatif meluas dan angka kemiskinan cenderung menurun. Akses terhadap pendidikan, posisi strategis dalam bisnis, dalam lembaga birokrasi dan lembaga akademik memungkinkan mahasiswa Islam dan para tokoh reformis yang berbasis di perkotaan

ini mempromosikan pendirian ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Oleh banyak kalangan, fenomena ini sering dilihat sebagai kendaraan untuk mempersatukan, membangun dan mengartikulasikan kembali aspirasi kelas menengah baru muslim.¹³ Namun, para elit kelompok ini tetaplah terkoneksi dan terjalin erat dengan penguasa Orde Baru.

Pembentukan ICMI pada tahun 1990 bersamaan dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) pelan-pelan telah membawa kembali isu Islam ke dalam agenda politik. Figur-figur penting di dalamnya adalah Amien Rais dan Sri Bintang Pamungkas—untuk menyebut beberapa nama. Selain itu juga ada Cak Nur, Eggy Sudjana, Din Syamsuddin, dan Adi Sasono yang ikut serta memberi masukan kepada organisasi dan membantu menyokong isu-isu kelompok muslim. Media baru *Republika* jauh-jauh hari juga sudah diluncurkan pada 1983 dan majalah *Umat* pada 1984 yang bersama dengan Yayasan Abdi Bangsa sebagai penyandang dana bagi pendidikan Islam. Kendati demikian, mereka-mereka ini dikritik oleh Abdurrahman Wahid yang merupakan pemimpin kelompok Islam tradisional karena ICMI dianggap mendukung dan menciptakan ruang fragmentasi etno-religius di Indonesia.

Apa yang menarik kemudian adalah bahwa setelah tahun 1992, Orde Baru segera memainkan bandul Islam, bersamaan dengan perkembangan-perkembangan baru tersebut di atas yang disokong oleh Suharto dan elemen-elemen elit Orde Baru yang

¹² Azyumardi Azra. *Civil Society and Democratization in Indonesia. Civil Society in Asia*. D. Schak & W. Hudson.(eds.) Burlington: Ashgate, 2003. H. 73-86.

¹³ Robert W. Hefner. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. New Jersey: Princeton University Press, 2000.

korup.¹⁴ Seiring dengan kegigihan Soeharto untuk mencoba membangun kepercayaan dari kelompok-kelompok Islam, banyak intelektual muslim muda semakin menonjol di Golkar dan memperoleh akses dalam birokrasi lewat HMI dan ICMI. Ini tampaknya strategi cerdas yang dilakukan Suharto untuk meraih dukungan Islam yang sedang menggeliat ketika kekuasaannya sedang terancam oleh melemahnya dukungan militer dan tumbuhnya gerakan-gerakan pro-demokrasi. Soeharto menggeser aliansi dari faksi tentara “merah-putih” ke arah faksi militer “hijau” untuk menopang kekuasaannya. Inilah saat dimana sering dinyatakan sebagai era kebangkitan kembali pengaruh Islam dalam pemerintahan. Namun demikian ini sekaligus juga mengindikasikan suatu kegagalan Islam politik di Indonesia untuk mendominasi kekuasaan negara dan ekonomi.

Demokratisasi dan Fragmentasi Politik Islam di Era Reformasi

1. Warna-warni politik Islam

Gelombang demokratisasi yang berlangsung sejak keruntuhan rezim Orde Baru rupanya benar-benar membawa angin segar bagi munculnya beragam ekspresi politik Islam di Indonesia. Hal ini misalnya dapat dilihat dari banyaknya buku-buku terjemahan yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit Islam yang terpajang di toko-toko buku mengenai sejumlah topik keislaman seperti teologi Islam, teori politik Islam, sejarah dan hukum Islam yang diterjemahkan dari bahasa

Arab. Kelompok-kelompok diskusi diorganisasikan di kampus-kampus dan para orang tua yang sangat bersemangat mengirim anak-anaknya mereka ke sekolah-sekolah Islam. Kantor-kantor pemerintah dan hotel dilengkapi dengan mushola dan masjid.

Situasi ini sebetulnya sudah mulai muncul sejak 1980an dan terus meningkat pada era 1990an dimana kelas menengah baru mulai terbentuk seiring dengan proses modernisasi yang dijalankan oleh negara. Pada saat yang sama kelas menengah baru ini menunjukkan kecenderungan untuk menganut suatu identitas muslim yang ketat terutama setelah rezim Soeharto mengakomodasi mereka di tahun-tahun menjelang akhir kekuasaan. Seperti yang bisa kita amati bahwa semakin banyak aktor-aktor politik berorientasi Islam baik yang moderat maupun radikal memasuki arena publik politik. Munculnya ICMI, KAMMI dan belakangan fenomena popularitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kalangan kaum muda urban perkotaan memperlihatkan trend ini.

Dari kalangan Islam, dua aktor kunci yang harus disebut di era reformasi adalah Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan Amin Rais. Dua orang ini bersama dengan intelektual lain seperti Cak Nur secara konsisten terus memperjuangkan gagasan-gagasan demokrasi yang bisa mendukung proses transisi, seperti ide hak-hak politik rakyat, pemilihan umum yang transparan, penghapusan dwifungsi ABRI sebagai sesuatu yang seturut dengan nilai-nilai Islam. Pandangan mereka merepresentasikan suatu orientasi kekuasaan yang demokratis ketimbang suatu tuntutan terbentuk

¹⁴ Vedi R. Hadiz & Khoo Boo Teik. *Op.cit.*

negara Islam.¹⁵ Gus Dur dan Amin Rais menjadi tokoh kunci karena keduanya adalah pemimpin organisasi massa terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menstabilkan transisimenujudemokrasi.Selain karena keduanya adalah tokoh yang diterima publik secara luas, juga mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹⁶

Segera setelah reformasi, Gus Dur didesak oleh para kiai NU untuk menimbang peran NU dalam arena politik. Mereka berharap berpartisipasi dalam politik kendatipun Wahid memperingatkan bahwa kembalinya NU ke politik bisa merusak misi sosial. Segera kemudian Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai sayap politik NU. Kendatipun membawa basis massa NU, Gus Dur secara konsisten lkmenekankan pandangan pluralis NU dan mendukung Pancasila sebagai ideologi negara. Kendati demikian, ketegangan antar Wahid dan pamannya Yusuf Hasyim dan saudaranya Salahuddin Wahid, telah menciptakan perpecahan di tubuh NU dan akhirnya melahirkan partai politik baru, Partai Kebangkitan Ummat (PKU).

Sementara itu Amin Rais yang mantan pemimpin Muhammadiyah juga membentuk partai politik sebagai lokomotif Islam reformis yakni Partai Amanat Nasional (PAN), setelah ia gagal mendekati organisasi-organisasi modernis yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI)

termasuk Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dan Komite Indonesia Untuk Solidaritas dengan Dunia Islam (KISDI) guna menggalang dukungan yang lebih luas. Amin terus terang menolak PBB yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra yang dianggap terlalu sektarian untuk menarik banyak dukungan. Kenyataannya PAN didominasi oleh kader Muhammadiyah yang dalam perkembangannya mengingkari klaim pluralisme politik yang dinyatakannya sendiri.¹⁷ Dengan demikian akhirnya kemungkinan munculnya parpol politik Islam bersatu semakin mengecil.

Fragmentasi suara Islam tampak terus berlanjut sepanjang tahun 1998-1999 dengan berdirinya partai-partai lain seperti Partai Keadilan, Partai Umat Islam dan Partai Masyumi Baru. Partai-partai ini cenderung memiliki pandangan ortodoks. Sementara itu DDII dan KISDI masih setia pendukung BJ Habibie untuk mengimbangi dukungan muslim terhadap tokoh nasionalis sekuler Megawati Sukarnoputri dan PDIP.¹⁸ Dalam satu barisan ini MUI dan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) lebih mendorong umat Islam untuk memilih partai Islam yang mengisyaratkan bahwa presiden dan wapres harus laki-laki dan muslim.

Pada akhir 1998, lebih dari 80 partai politik berniat bersaing dalam pemilu, 40 diantaranya merupakan partai Islam. Setidaknya dari 40 partai ini bisa

¹⁵ Azyumardi Azra. *Opcit.*

¹⁶ M. Falaakh. *Nahdlatul Ulama and Civil Society in Indonesia. Islam and Civil Society in Southeast Asia.* M. Nakamura, S. Siddique and O. Bajunid, eds. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2001. Hal. 201-206

¹⁷ M. Diederich. "A Closer Look at 'Dakwah' and Politics in Indonesia: The Partai Keadilan." *Archipel* 64, 2002. H. 20-39

¹⁸ M.F. Falaakh. "Islam and the Current Transition to Democracy ". Dalam A. Budiman, B. Hatley & D. Kingsbury (eds.). *Indonesia Reformasi: Crisis and Change in Indonesia.* Clayton, Monash Asia Institute, 1999. hal. 205

dikelompokkan ke dalam tiga kategori politik Islam.¹⁹ *Pertama*, gerakan dan partai Islam santri yang menyokong agenda Islam dan implementasi hukum Islam. Ini mencakup gerakan seperti KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) yang merupakan perpanjangan dari kelompok Tarbiyah yang berafiliasi dengan Partai Keadilan, KISDI, DDII, dan Partai Bulan Bintang. *Kedua*, partai-partai sinkretis yang bersedia berkoalisi dengan partai non-Islam sambil mempertahankan garis Islam partai. Dalam kategori ini bisa dimasukkan PAN, Forum Partai-Partai Islam; Partai Ummat Islam; Partai Islam Persatuan Indonesia; Partai Masyumi; Partai Syarikat Islam Indonesia; Partai Kebangkitan Umat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dan *ketiga* adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meskipun mewakili Islam tradisional NU namun partai bekerja sebagai partai pluralis abangan. Sementara itu dari 48 partai yang bertarung pada pemilu 1999, 20 partai diantaranya adalah partai Islam. Sementara itu Golkar yang merupakan partai mapan warisan Orde Baru tidak bisa dikatakan tanpa memperoleh dukungan dari konstituen Islam. Seperti yang disinggung di atas, banyak intelektual muslim muda memimpin di Golkar. Lalu untuk bersaing dalam lingkungan pemilu yang sedang berubah setelah 1998, Golkar memelihara dukungan dari intelektual muslim terkemuka seperti Akbar Tanjung, Fahmi Idris, Ekky Syahrudin, Marwah Daud Ibrahim, Adi Sasono dan Dewi Fortuna Anwar.²⁰

¹⁹ Jamhari. *Islamic Political Parties: Threats or Prospects? Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos?*. G. Forrester, (ed.). Bathurst: Crawford House Publishing, 1999. Hal. 184-185

²⁰ M. Falaakh. *Op.cit.* Hal. 201-206

Dalam konstelasi spektrum politik semacam ini maka tepat bila dinyatakan bahwa Islam sebenarnya adalah sebuah lautan yang didalamnya banyak jenis ikan yang berenang. Pada kenyataannya seperti yang tampak pada hasil pemilu 1999 bahwa rakyat lebih mendukung partai yang mendukung gagasan pluralis dan nasionalis. Hanya empat partai Islam saja (PBB, PAN, PKB, PPP) yang memperoleh angka minimum 2% yang dibutuhkan untuk menduduki parlemen.²¹ Dari sini bisa disimpulkan bahwa mayoritas rakyat lebih cenderung memilih untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis ketimbang membentuk suatu negara Islam berdasarkan syariat.

Perkembangan baru di era reformasi ini juga ditandai oleh kebangkitan politik Islam yang mengejawantahkan diri dalam bentuk organisasi-organisasi Islam semi-militer atau organisasi Islam pinggiran lain yang mengklaim didirikan untuk melindungi umat dari kemungkaran. Meskipun pada kenyataannya organisasi-organisasi tersebut digerakkan oleh para preman jalanan.²² Sebut saja di antara organisasi ini adalah Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rempug (FBR) di Jakarta dan Korps Hizbullah di Jawa Tengah. Aktivitas mereka adalah melakukan penggerebekan terhadap apa yang mereka namakan sebagai "tempat-tempat maksiat" seperti klub-klub malam, arena perjudian, dan tempat-tempat pelacuran di perkotaan. Apa yang menarik dari organisasi-organisasi ini adalah bahwa kelompok Islamis ini meraih dukungan dan

²¹ Dhurorudin Mashad. *Op.cit.* hal. 152

²² Martin van Bruinessen. "Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 10, 2, 2002, pp. 117-154.

beranggotakan dari kaum miskin di sektor-sektor informal, para pekerja dan kelas menengah bawah serta kaum pengangguran akibat krisis ekonomi. Sebuah gejala yang tidak muncul pada masa rezim *developmentalis* Orde Baru yang diakui oleh banyak kalangan berhasil menenangkan masyarakat dengan ketersediaan kesempatan kerja dan surutnya kemiskinan. Oleh karenanya pada masa Orde Baru gerakan-gerakan Islam semacam itu tidak tumbuh subur. Baru setelah Soeharto runtuh diterpa krisis, gerakan-gerakan Islam seperti ini tumbuh dengan pesat.²³

Dilihat dari sudut pandangan sosiologis, bisa jadi munculnya organisasi-organisasi paramiliter ini dipicu oleh rasa frustrasi dan ketidakpuasan sosial dan ekonomi terhadap kondisi di era reformasi dimana pemerintah baru reformis yang berkuasa tidak menunjukkan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Mereka juga bisa dibaca sebagai menggantikan posisi kelompok kiri berbasis massa yang terdeprivasi yang selama Orde Baru dihabisi dan berhadapan dengan kelompok kelas menengah dan kelas atas lama dan pejabat negara yang memperoleh untung dari penguasa sekular. Seringkali kelompok Islam semacam ini khususnya yang radikal mendapatkan pengikut yang semakin bertambah; bahkan mereka mampu memanipulasi ketidakmampuan politisi untuk memasukkan reformasi keagamaan dalam agenda politik. Pelatihan-pelatihan dan patronase politik mereka dengan faksi tentara "hijau" ikut memfasilitasi munculnya

kelompok-kelompok paramiliter lokal yang terhubung dengan gerakan Islam radikal.

Adalah menarik dicermati bahwa bangkitnya ekspresi politik Islam juga diwarnai oleh tuntutan berbagai kelompok atas pemberlakuan syariat Islam. Tuntutan ini terutama membengkak pada periode pemerintahan Wahid dimana mantan pemimpin NU tersebut dipersepsikan sebagai representasi aspirasi politik umat Islam dalam pemerintah. Tiga partai politik Islam yakni PPP, PBB dan PK dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 dan 2001 mengajukan proposal pencantumkan kembali tujuh kata Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945. Tetapi upaya ini selalu gagal karena dihadang oleh fraksi-fraksi lain di MPR. Kendati tuntutan tersebut mendapatkan dukungan dari partai-partai Islam kecil dan kelompok-kelompok Islam radikal yang menggelar demonstrasi di depan gedung parlemen, organisasi massa keagamaan terbesar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah justeru menolak tuntutan kelompok-kelompok Islamis tersebut.²⁴

Meskipun upaya kelompok Islamis ini gagal di parlemen, mereka tampaknya tidak pernah menyerah. Sebaliknya, justeru mereka menggunakan taktik lain yakni mengarahkan tuntutan penegakan syariat itu ke daerah-daerah bersamaan dengan semangat otonomi daerah yang tengah menggeliat. Ini misalnya terlihat di berbagai daerah seperti Sulawesi Selatan, Riau, Banten, Pandeglang, Tasikmalaya, Cianjur, Garut, Indramayu, Pamekasan dan

²³ R William Liddle. "New Patterns of Islamic Politics in Democratic Indonesia". *Asia Program Special Report*. No.10, April 2003

²⁴ Taufik Adnan Amal & Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004. hal. 62-63

lainnya yang pemerintah daerahnya menerima desakan dari kelompok Islamis lokal untuk menciptakan peraturan-peraturan daerah (Perda) tentang syariat atau mencanangkan pemberlakuannya.

Di Sulawesi Selatan, tuntutan penegakan syariat dilakukan oleh Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI) yang sebelumnya bernama KPPSI atau Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam. Pada tahun 2001, Komite ini mengeluarkan Deklarasi Muharram yang isinya mendesak DPRD Sulawesi Selatan agar menindaklanjuti tuntutan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan. Sementara itu di Banten, desakan penegakan syariat ditiadakan secara getol oleh Partai Keadilan. Suatu lokakarya daerah diselenggarakan guna menggalas topik tersebut dan akhirnya disepakati pembentukan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSIB) dan rancangan perda bernuasa syariat. Di Cianjur, gema tuntutan penegakan syariat dalam peraturan daerah dilakukan oleh Bupati pada tahun 2001 yang didukung oleh Pondok Al-Zaytun. Bupati sendiri membentuk Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) yang bertugas mengkaji, merancang dan mendesak DPRD agar menyetujui Raperda penegakan syariat yang sudah disusun.

Di berbagai daerah lain, tuntutan serupa juga memiliki modus yang sama. Kalangan Islamis lokal membentuk suatu komite bersama untuk mempersiapkan dan mendesak DPRD dan Pemda setempat memberlakukan peraturan-peraturan berdasarkan syariat, meskipun rumusan konkret tentang syariat sendiri pada kenyataan

masih menjadi perdebatan sengit.²⁵ Tampaknya, kebanyakan peraturan-peraturan yang dipersepsi sebagai berkategori syariat ini seperti perda berjilbab, perda sholat berjamaah, perda baca quran, dan lainnya, dan sama sekali tak menyentuh isu-isu sosial yang bersifat mendesak.

2. Fragmentasi Kepentingan Partai Politik Islam

Sebagaimana kita jumpai di era Orde Lama, pengelompokan-pengelompokan partai politik Islam juga terjadi pada era reformasi bahkan dengan jumlah yang lebih banyak. Tampaknya akan keliru bila memandang kebangkitan politik Islam yang ditandai oleh banyaknya pengelompokan politik Islam ini didasari oleh perbedaan ideologi. Agak berbeda dengan partai Islam di masa-masa sebelumnya dimana keragaman partai Islam bisa dikenali dari nama dan ideologinya, di masa reformasi pengelompokan-pengelompokan politik Islam lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kepentingan dan faktor kemiripan pandangan antara yang substansialistik dan yang formalistik.²⁶

Hal ini bisa dilihat dari 41 partai Islam dalam pemilu 1999 yang masing-masing memiliki asas, basis massa dan tujuan yang mirip. Dari segi asas partai misalnya, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) 1905, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), PPP, PMB (Partai Masyumi Baru), PUI (Partai Umat Islam) dan PBB (Partai Bulan Bintang) memiliki substansi yang sama yakni menjadikan Al-Quran dan Hadiz sebagai azas meski dinyatakan dengan

²⁵ *Ibid.*, hal. 82-96

²⁶ Dhurorudin Mashad. *Opcit.*, hal. 157-193

sebutan berbeda. Sementara 8 partai lain seperti PUMI (Partai Umat Muslimin Indonesia, Partai Suni (Solidaritas Uni Indonesia), PNU (Partai Nahdlatul Ummah), PCD (Partai Cinta Damai), PKU (Partai Kebangkitan Umat), PAY (Partai Abul Yatama), dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) masing menyebut Pancasila sebagai dasar namun dengan tetap membawa embel-embel "Islam" atau "Ahlussunna Waljamaah". Adapun dari segi tujuan metampakkan hal yang sama; perbedaan hanya pada kalimat bukan hal yang bersifat substansial.

Tingginya faktor kepentingan ini bisa dicermati dari konflik internal sebuah subkultur karena perebutan basis konstituen. Dalam subkultur pesantren yang menjadi basis sosial NU, terdapat partai-partai seperti PKB, PKU, dan Partai Suni. Faktor kepentingan ini juga bisa ditelisik dari latar belakang pribadi para tokoh partai. Ini misalnya bisa dilihat dari pendirian Partai Suni oleh Abu Hasan yang merupakan pesaing Gus Dur dalam muktamar Cipasung. Fragmentasi berlatar belakang sama juga bisa dilihat dalam partai PSII dan PSII 1905. Sementara kelompok yang mengklaim sebagai pelanjut Masyumi juga terfragmentasi ke dalam beragam partai seperti PBB, PMB dan PPII (Partai Persatuan Islam Indonesia) Masyumi. Padahal sebetulnya mereka memperebutkan konstituen yang sama dan tidak berubah, sehingga dalam pemilu 1999 partai-partai Islam harus berbagi rata memperebutkan massa. Akibatnya segera kemudian mereka begitu terperangah melihat hasil pemilu setelah mendapati bahwa partai nasionalis sekuler seperti PDIP justru memperoleh suara yang signifikan dalam pemilu. PDIP sendiri dalam pemilu 1999 memperoleh suara total

37,4%, sementara partai-partai Islam harus berbagi suara dalam jumlah yang jauh lebih kecil meskipun bila ditotal semua suara partai-partai ini mencapai 30,48% suara.²⁷

Tentu saja kenyataan pahit ini bisa dipersepsi akan membawa dampak luas, yakni termarginalkannya aspirasi kepentingan Islam dalam pemerintahan berhadapan dengan kepentingan nasionalis-sekuler. Hal terakhir inilah tampaknya yang kemudian mendorong suatu kebutuhan untuk mempersatukan pengelompokan-pengelompokan Islam sebagaimana terlihat dari fakta bahwa tokoh NU dan sekaligus pendiri PKB yang dipilih menjadi presiden. Meskipun PKB hanya memenangi 12,6% suara dan 51 kursi yang kalah jauh bila dibandingkan dengan suara PDIP di parlemen yang sebesar 153 kursi. Sekali lagi ini memperlihatkan kembali suatu bentuk kesepakatan antar elit kepentingan yang bersifat sementara dan ditambah lagi ketrampilan berpolitik yang dimainkan para politisi dalam koalisinya dengan faksi-faksi dalam tentara dan Golkar.

Bukti bahwa kepresidenan Wahid bukan merupakan kepentingan bersama politik Islam reformis adalah bahwa kendatipun kekuatan politik Islam menyokong Abdurrahman Wahid sebagai presiden, pada kenyataannya dalam periode kepemimpinan Wahid tidak benar-benar menunjukkan stabilitas dan kemapanan representasi politik Islam dalam kekuasaan. Dalam konteks transisi, periode ini justru ditandai oleh situasi yang tidak menentu dan ketegangan antar kelompok dalam tubuh Islam. Para aktor politik Islam justru saling berkelahi dan

²⁷ *Ibid.* Hal. 209-210

mengamankan posisi masing-masing yang sedang terancam. Lebih jauh Wahid sendiri memperburuk keadaan karena tidak mampu menstabilkan koalisi yang efektif, dengan memecat beberapa menteri dalam kabinetnya dan memancing hubungan yang tak nyaman dengan faksi militer yang berpengaruh.²⁸ Pada akhirnya sikap-sikap ini kembali memecah pengelompokan politik di parlemen dan MPR yang sudah terbentuk sebelumnya baik dari kelompok Islam maupun sekuler dimana elemen-elemen konservatif dalam elit politik dan militer menganggap Wahid sebagai ancaman status quo. Ujungnya adalah: karena koalisi kepentingan yang pecah, Presiden Wahid akhirnya dimakzulkan pada pertengahan 2001 dan digantikan oleh Megawati yang justeru merepresentasikan kelompok nasionalis-sekuler sebagai presiden berikutnya.

Fragmentasi politik Islam berbasis kepentingan elit ini terus berlanjut pada Pemilu 2004, kendatipun pada pemilu kali ini partai yang berpijak pada agama sudah turun drastis dibandingkan dengan pemilu 1999. Sebagaimana dinyatakan oleh Mashad bahwa dalam pemilu 2004 "isu Islam politik sudah lenyap".²⁹ Faktor ideologi atau visi Islam nyaris bukan determinan penting pada kompetisi dalam pemilu.

Buktinya, hampir semua suara partai Islam atau partai berbasis massa Islam menurun, kecuali PKS yang mengalami lonjakan peningkatan yang sangat signifikan. Apalagi hal ini diperparah oleh konflik internal

yang mendera partai-partai Islam seperti PKB dan PPP yang pecah dan akhirnya melahirkan partai baru yakni PBR (Partai Bintang Reformasi). Sementara itu dalam pilpres putaran II yang merupakan pilpres pertama yang dilakukan secara langsung pada tahun 2004, suara partai politik Islam terbelah antara yang Pro-Megawati yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi dan Pro-Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Jusuf Kalla dimana kedua capres tersebut sama-sama berhaluan nasionalis-sekuler. Tampak benar bahwa kepentingan para tokoh Islam sebenarnya telah mengatasi prinsip-prinsip keagamaan yang selama ini pernah dianut. PPP dan PBR misalnya mendukung Megawati, padahal para tokoh Islam pernah menentang kepemimpinan perempuan dengan dalih agama.

Dalam pilpres 2004 pun iming-iming jabatan disinyalir telah berperan membelah suara kelompok Islam ke dalam dua kubu capres yang notabene sama-sama berasal dari kelompok "non-Islam politik" yang berkolaborasi dengan kaum santri yang sudah puas diberi jatah posisi cawapres.³⁰ Sikap pragmatis yang sama juga terlihat pada pilihan politik PKS --satu-satunya partai Islam dengan perolehan suara meningkat drastis pada pemilu 2004- yang mendukung pasangan SBY-JK. Bahkan PKS dinilai "mencla-mencle" karena semula PKS berniat menjadi oposan di parlemen, lalu berubah mendukung pasangan Amien Rais-Siswono Yudohusodo, dan ketika Amien kalah segera menjatuhkan pilihan ke pasangan SBY-JK.³¹

²⁸ Greg Barton. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKIS, 2002

²⁹ Dhurorudin Mashad. *Opcit.*, hal. 256

³⁰ *Ibid.*, hal. 297-298

³¹ *Ibid.*, hal. 295

Semua gejala ini tampak memperlihatkan kecenderungan semakin mencairnya sekat-sekat politik dan ideologi antara kubu Islam dan kubu sekuler di antara partai-partai yang berkontestasi dalam pemilu di era reformasi. Pada kenyataannya kedua kubu tersebut hanya bertarung demi memperebutkan kekuasaan dan kepentingan elit serta kelompoknya sendiri. Memang benar bahwa sejak reformasi partai-partai baru berbasis Islam didirikan dan kelompok-kelompok Islamis masuk ke dalam roda kompetisi pemilu. Namun para pemain baru ini ternyata memanfaatkan kompetisi pemilu untuk membangun koalisi kekuasaan ketimbang benar-benar membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.

Selanjutnya apa yang tampak adalah bahwa kebangkitan politik Islam pasca 1998 berlangsung tanpa adanya partai yang benar-benar bersih dan saleh. Kalaupun popularitas PKS dalam pemilu dijadikan indikator kebangkitan dan ditambah dengan meluasnya perda-perda yang bernuansa syariah, tapi kenyataannya mereka gagal menyentuh isu-isu seperti korupsi yang menggurita di tubuh pemerintah dan parlemen, dan mulai terlihat di dalam partainya sendiri.

Penutup

Artikel ini mengeksplorasi pasang-surut dan fragmentasi dinamis politik Islam di Indonesia. Dengan menghubungkan dinamika tersebut dengan proses-proses historis dan konteks sosial-politik yang membentuknya, gambaran mengenai politik Islam sejauh ini tampak lebih

kompleks. Sejak awal pergerakan nasional, gerakan politik Islam seperti yang tercermin dari Sarekat Islam (SI) terbentuk dalam konteks persaingan ekonomi dengan para pengusaha kapitalis Cina yang dikontrol oleh kolonial Belanda. Sampai kemudian motif ekonomis dari identitas politik Islam ini semakin bergeser ke arah tuntutan penegasan normatif Islam menjadi ideologi negara dan menimbulkan benturan antara kekuatan-kekuatan populis yang sudah ada.

Pada masa Orde Baru, kekuatan ekonomi nasional kembali didominasi oleh para pengusaha (sebagian besar Cina) yang terkoneksi dengan Soeharto dan kroni-kroninya. Sementara itu kelompok-kelompok Islamis menderita peminggiran ekonomi dan politik di bawah rezim. Guna merebut sumberdaya ekonomi yang mungkin, kelompok-kelompok Islam moderat masuk ke dalam sistem birokrasi dan mengakses peluang bisnis yang ada sambil pada saat yang sama beraliansi dengan Soeharto dan elit Orde Baru yang korup. Hasilnya adalah suatu kelas menengah Islam baru yang menjadi kekuatan sosial bagi amunisi gerakan reformasi, namun mereka tetap tak terpisahkan dari elit Orde Baru, dan setelah itu menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Sebagaimana tergambar dalam uraian di atas, sepanjang sejarah Indonesia dan khususnya setelah reformasi, kekuatan politik Islam semakin terfragmentasi secara tajam. Fragmentasi ini tampaknya lebih disebabkan oleh kepentingan elit masing-masing kelompok tersebut ketimbang atas dasar perbedaan ideologi. Hal ini menyebabkan kekuatan politik Islam

tidak pernah benar-benar bulat apalagi jika hendak memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat. Adapun perjuangan atas identitas Islam dalam wujud penegakan syariat adalah upaya yang bersifat artifisial saja ketimbang menyentuh isu ekonomi dan kebutuhan

mendasar umat. Walhasil, keberhasilan politik Islam dalam melakukan transformasi sosial, ekonomi dan politik selalu digagalkan sendiri oleh watak elitis dari arus politik Islam utama.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Amal, Taufik & Rizal Panggabean, Samsu. 2004. *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- A.P.E Koever. 1985. *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?*. Jakarta: Grafiti Press
- Azra, Azyumardi. 2003. *Civil Society and Democratization in Indonesia. Civil Society in Asia*. D. Schak & W. Hudson.(eds.) Burlington, Ashgate.
- Barton, Greg. 2002. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKIS
- Bruinessen, Martin van. 2002. "Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 10, 2.
- Diederich, M. 2002. "A Closer Look at 'Dakwah' and Politics in Indonesia: The Partai Keadilan." *Archipel* 64.
- Falaakh, M. 1999. "Islam and the Current Transition to Democracy". Dalam A. Budiman, B. Hatley & D. Kingsbury (eds.). *Indonesia Reformasi: Crisis and Change in Indonesia*. Clayton, Monash Asia Institute.
- _____. 2001. *Nahdlatul Ulama and Civil Society in Indonesia. Islam and Civil Society in Southeast Asia*. M. Nakamura, S. Siddique and O. Bajunid, eds. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies.
- Hamilton-Hart, N. 2005. 'Terrorism in Southeast Asia: expert analysis, myopia and fantasy', *Pacific Review* Vedi R. Hadiz & Khoo Boo Teik. 2011. "Approaching Islam and politics from political economy: a comparative study of Indonesia and Malaysia". *The Pacific Review*, Vol. 24 No. 4
- Hefner, Robert W. 2000. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. New Jersey: Princeton University Press.
- Jamhari. 1999. *Islamic Political Parties: Threats or Prospects? Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos?*. G. Forrester, (ed.). Bathurst: Crawford House Publishing.
- Liddle, R. "New Patterns of Islamic Politics in Democratic Indonesia". *Asia Program Special Report*. No.10, April 2003
- Mashad, Dhurorudin. 2008. *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Noer, Deliar. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES

- Sidel, J. T. 2006. *Riots, Pogroms and Jihad: Religious Violence in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press
- Wahid, Abdurrahman. 1984. "Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa Ini", *Prisma*, No. 4 April
- Mashad. Dhurorudin. 2008. *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hal. 29
- Hamilton-Hart, N. 2005. 'Terrorism in Southeast Asia: expert analysis, myopia and fantasy', *Pacific Review* 18(3): 303-325.
- Hadiz, Vedi R. & Boo Teik, Khoo. 2011. "Approaching Islam and politics from political economy: a comparative study of Indonesia and Malaysia". *The Pacific Review*, Vol. 24 No. 4: 463-485
- Koeber. A.P.E. 1985. *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?*. Jakarta: Grafiti Press
- Noer, Deliar. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES
- Wahid, Abdurrahman. 1984. "Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa Ini", *Prisma*, No. 4 April 1984, hal. 31-33
- Sidel, J. T. 2006. *Riots, Pogroms and Jihad: Religious Violence in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press
- Azra, A. 2003. *Civil Society and Democratization in Indonesia. Civil Society in Asia*. D. Schak & W. Hudson.(eds.) Burlington, Ashgate: 73-86.
- Hefner, R. 2000. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. New Jersey: Princeton University Press.
- Falaakh, M. 2001. *Nahdlatul Ulama and Civil Society in Indonesia. Islam and Civil Society in Southeast Asia*. M. Nakamura, S. Siddique and O. Bajunid, eds. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies. Hal. 201-206
- Diederich, M. 2002. "A Closer Look at 'Dakwah' and Politics in Indonesia: The Partai Keadilan." *Archipel* 64: 20-39
- Falaakh, M. F. 1999. "Islam and the Current Transition to Democracy". Dalam A. Budiman, B. Hatley & D. Kingsbury (eds.). *Indonesia Reformasi: Crisis and Change in Indonesia*. Clayton, Monash Asia Institute. hal. 205
- Jamhari. 1999. *Islamic Political Parties: Threats or Prospects? Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos?*. G. Forrester, (ed.). Bathurst: Crawford House Publishing. Hal. 184-185
- Van Bruinessen. 2002. "Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 10, 2, 2002, pp. 117-154.
- R William Liddle. "New Patterns of Islamic Politics in Democratic Indonesia". *Asia Program Special Report*. No.10, April 2003
- Taufik Adnan Amal & Samsu Rizal Panggabean. 2004. *Politik Syariah Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, hal. 62-63
- Barton, Greg. 2002. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKIS